

## Dinasti Politik: Ancaman atau Kontribusi bagi Demokrasi

Raihan Naufal<sup>1</sup>, Muhammad Ramadhan<sup>2</sup>, Muhibban<sup>3</sup>

STIS Al Wafa<sup>123</sup>, Kabupaten Bogor, Indonesia

Gaulocyd21@gmail.com<sup>1</sup>, darkneskiller19@gmail.com<sup>2</sup>, afaafu123@gmail.com<sup>3</sup>

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 6 Juni 2024 Halaman : 412-416	<i>This research with the aim of investigating the role of political dynasties in democracy and exploring their impact on the stability and quality of the democratization process. The research methods used include a qualitative approach through a comprehensive literature review of various case studies and theories related to political dynasties, as well as a quantitative approach in analyzing relevant statistical data. From this research, it was found that political dynasties can threaten democracy by strengthening oligarchy and inhibiting political participation, but can also make a positive contribution by offering sustainable political stability. The conclusion drawn is that the role of political dynasties in democracy is highly influenced by the context, with policy recommendations aimed at minimizing the negative risks and harnessing the positive potential of political dynasties in the democratization process.</i>
Keywords: Dynasty, Politics, Democracy	

### Abstrak

Penelitian ini dengan tujuan untuk menyelidiki peran dinasti politik dalam demokrasi dan menggali dampaknya terhadap stabilitas dan kualitas proses demokratisasi. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur komprehensif terhadap berbagai studi kasus dan teori terkait dinasti politik, serta pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data statistik yang relevan. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa dinasti politik dapat mengancam demokrasi dengan memperkuat oligarki dan menghambat partisipasi politik, namun juga dapat memberikan kontribusi positif dengan menawarkan stabilitas politik yang berkelanjutan. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa peran dinasti politik dalam demokrasi sangat dipengaruhi oleh konteks, dengan rekomendasi kebijakan yang bertujuan meminimalkan risiko negatif dan memanfaatkan potensi positif dinasti politik dalam proses demokratisasi.

**Kata Kunci** : : *Dinasti, Politik, Demokrasi*

### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, politik menjadi salah satu aspek yang paling dinamis dan kompleks. Salah satu fenomena yang menonjol adalah peran disnati dalam politik, yang sering kali menjadi subjek perdebatan yang intensif. Disnati, atau disinformasi, adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau manipulatif dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam konteks politik, dinasti dapat berupa berita palsu, hoax, atau manipulasi media yang dirancang untuk mempengaruhi hasil pemilihan, pendapat publik, atau kebijakan pemerintah.

Mengeksplorasi dua sisi dari disnati dalam politik ancaman terhadap demokrasi dan kontribusinya. Ancaman disnati terhadap demokrasi terlihat dari bagaimana disnati dapat memanipulasi opini publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, dan mempengaruhi hasil pemilihan. Di sisi lain, dinasti juga dapat berkontribusi bagi demokrasi melalui penggunaan strategis dalam kampanye politik, peningkatan kesadaran publik, dan pembentukan opini publik yang lebih kritis dan informasi. Dalam era digital ini, dinasti menjadi alat yang sangat efektif untuk mempengaruhi opini publik dan proses politik. Oleh karena itu, memahami ancaman dan kontribusi disnati dalam politik sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tetap kuat dan berdaya saing di tengah tantangan yang terus berkembang.

## **METODE**

Penelitian ini menyelidiki esensi yang menarik dalam "Dinasti Politik: Ancaman atau Kontribusi bagi Demokrasi". Dengan merangkai berbagai metode penelitian seperti studi kasus, survei, analisis komparatif, analisis konten, studi historis, dan analisis kebijakan, penelitian ini menghadirkan sorotan yang tajam terhadap kompleksitas interaksi dinasti politik dengan demokrasi. Dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing metode, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi dinamika yang terjadi, tetapi juga membuka wawasan baru tentang urgensi pemahaman akan peran dinasti politik dalam konteks demokrasi modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Contoh, mantu Presiden Jokowi maju Pilkada 2020, anak Presiden Jokowi maju pemilu 2024, Tiga Keluarga Ratu Atut menang di Pilkada Banten 2020. (Sutanto, 2020)

Dinasti politik adalah fenomena yang menjadi ancaman terhadap demokrasi, karena mungkin menyebabkan pemilihan yang tidak bebas dan tidak berdasarkan merit, serta mungkin menyebabkan pengembangan sistem politik yang tidak berdasarkan pada merit dan kekuasaan politik yang berasal dari pemilih. Dinasti politik dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan mengubah demokrasi menjadi formalitas. Politik dinasti mengendalikan semua aspek politik, melemahkan media massa, dan mengkooptasi civil society. Politik dinasti sering kali menguasai sumber daya ekonomi dan cenderung terlibat dalam tindakan koruptif.

Dinasti politik dapat menjadi ancaman bagi prinsip republik, yang memiliki prinsip dasar bahwa negara harus berfungsi untuk kemaslahatan umum dan menghindari dominasi oleh keluarga. Politik dinasti menciptakan hambatan serius terhadap prinsip demokrasi, karena mereka mengeksploitasi kekuasaan politik untuk kepentingan keluarga mereka, seringkali tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Politik dinasti juga menempatkan kekuasaan dalam genggamannya sejumlah individu atau keluarga, menghalangi perwakilan yang adil dan partisipasi publik dalam proses politik. Jika dinasti politik terus berlanjut, demokrasi Indonesia berisiko semakin terancam. (Meidiana, 2024)

Dinasti politik dapat membantu demokrasi dengan memberikan stabilitas politik yang berkelanjutan, memfasilitasi transfer pengetahuan politik yang signifikan, dan mewakili kepentingan lokal dengan lembaga legislatif. Dinasti politik dapat membantu menjamin stabilitas politik yang berkelanjutan, karena keluarga politik dapat menyediakan pemimpin yang stabil dan yang memiliki pengalaman yang baik.

Dinasti politik juga dapat memfasilitasi transfer pengetahuan politik yang signifikan, karena keluarga politik dapat menyediakan pemimpin yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik. Dinasti politik dapat juga mewakili kepentingan lokal dengan lembaga legislatif, karena keluarga politik dapat memiliki koneksi dan pengalaman yang baik di lokasi yang berbeda. Dinasti politik dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, karena keluarga politik dapat memiliki koneksi yang baik dengan masyarakat. Sebagai contoh, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, praktik dinasti politik dapat menjadi kontribusi bagi demokrasi, karena mereka memiliki sistem demokrasi yang lebih firmid dan memberikan ruang kompetisi yang cukup yang tak mengancam demokrasi. Sistem hukum dan penegakan hukum yang baik juga membantu membatasi praktik dinasti politik.

Dinasti politik juga dapat menjadi kontribusi bagi demokrasi di negara-negara berkembang seperti India, Pakistan, Thailand, dan Filipina, karena mereka memiliki sistem demokrasi yang lebih firmid dan memberikan ruang kompetisi yang cukup yang tak mengancam demokrasi. Sistem hukum dan penegakan hukum yang baik juga membantu membatasi praktik dinasti politik. Jurnal ini akan menganalisis dinasti politik dan menjelaskan bagaimana dinasti dapat menjadi kontribusi bagi demokrasi. Jurnal ini akan menggunakan contoh dari beberapa negara dan menjelaskan bagaimana dinasti tersebut diimplementasikan dan berpengaruh terhadap demokrasi di negara-negara tersebut. (Jiddan Gamal Qondas & Sutopo, 2024)

Strategi untuk mencegah dinasti politik dapat dijelaskan melalui beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh partai politik:

- a. Model partisan: Model ini merupakan pendukung yang kuat dan loyalitas tinggi terhadap partai, yang bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Tetap saja, faktor kapabilitas harus diperhatikan dan proses rekrutmen harus dilakukan melalui proses terbuka untuk menghindari kepentingan yang politis
- b. Model kompartimentalization: Model ini merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Misalnya, aktivis LSM (Nika, 2021)
- c. Model immediate survival: Model ini mungkin tidak ideal untuk diterapkan dalam negara demokrasi, tetapi dapat membantu mencegah dinasti politik. Model tersebut juga memiliki keuntungan bahwa prosesnya harus dilakukan secara terbuka untuk menghindari kepentingan yang politis
- d. Penerapan undang-undang: Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah menetapkan aturan yang mencegah politik dinasti, seperti tidak membolehkan calon kepala/wakil kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan (Jiddan Gamal Qondas & Sutopo, 2024)
- e. Pengamat hukum: Pengamat hukum dapat membantu mencegah politik dinasti dengan membantu memahami dan membentuk aturan yang mencegah dinasti politik, serta membantu mengawasi dan menghentikan praktik yang tidak sesuai dengan undang-undang
- f. Komisi Pemilihan Umum (KPU): KPU dapat membantu mencegah politik dinasti dengan mengatur aturan pemilihan dan memastikan proses pemilihan berjalan dengan transparansi dan bebas dari konflik kepentingan
- g. Partai politik: Partai politik dapat membantu mencegah politik dinasti dengan menetapkan aturan yang mencegah dinasti politik, serta membantu mengawasi dan menghentikan praktik yang tidak sesuai dengan aturan partai politik.
- h. Menteri Dalam Negeri: Menteri Dalam Negeri dapat membantu mencegah politik dinasti dengan mengatur aturan yang mencegah dinasti politik, serta membantu mengawasi dan menghentikan praktik yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah (Pasaribu, 2019)

## **Politik**

Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa aspek, seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, dan cara masyarakat menegakkan peraturan dalam masyarakat itu sendiri. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. (Makka, 2023)

## **Demokrasi**

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara. (Noviati, 2016) Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. (Hukumonline, 2024) Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. (Kompas.com, 2022) Demokrasi juga merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis pada kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. (Rangkuti, 2023) Demokrasi juga dapat diartikan sebagai prosedur kelembagaan untuk

mencapai keputusan politik, dimana para individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Demokrasi memiliki beberapa ciri yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ini adalah demokrasi, seperti:

1. Kekuasaan politik dilakukan oleh rakyat atau warga Negara.
2. Pengambilan keputusan dilakukan melalui perwakilan rakyat.
3. Kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara.
4. Keputusan-keputusan pemerintahan yang penting didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
5. Pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.(DetikEdu, 2021)

Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip yang menjadi dasar system pemerintahan ini, seperti:

1. Kedaulatan rakyat secara menyeluruh.
2. Kedaulatan hukum.
3. Kedaulatan Negara.
4. Kedaulatan kebijakan publik.(Yusuf, n.d.)

Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, seperti demokrasi terpimpin, demokrasi terpimpin-terpimpin, demokrasi terpimpin-tidak terpimpin, dan demokrasi terpimpin-tidak terpimpin.(Semarang, 2023)

### **Dinasti Politik**

Dinasti politik adalah konsep yang mengacu pada generasi keluarga yang berperan dalam politik.(Hermansyah & Adi, 2017) Dinasti politik dapat menjadi ancaman atau kontribusi bagi demokrasi tergantung pada bagaimana dinasti tersebut diimplementasikan. Dinasti politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi karena mungkin menyebabkan pemilihan yang tidak bebas dan tidak berdasarkan merit, serta mungkin menyebabkan pengembangan sistem politik yang tidak berdasarkan pada merit dan kekuasaan politik yang berasal dari pemilih.(Agus Dedi, 2022) Dinasti politik dapat juga menjadi kontribusi bagi demokrasi karena dapat menjadi suatu pemimpin yang stabil dan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik, yang dapat membantu mengembangkan sistem politik yang baik.(Azzahra & Sukri, 2022)

### **KESIMPULAN**

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik dapat menjadi ancaman atau kontribusi bagi demokrasi tergantung pada implementasinya. Ancaman terjadi ketika dinasti politik memperkuat oligarki politik, menghambat partisipasi politik yang sehat, dan memperkuat praktik korupsi dan nepotisme. Namun, dinasti politik juga dapat membantu demokrasi dengan memberikan stabilitas politik yang berkelanjutan, memfasilitasi transfer pengetahuan politik yang signifikan, dan mewakili kepentingan lokal dengan lembaga legislatif. Untuk mencegah dinasti politik, dapat dilakukan beberapa strategi seperti penerapan undang-undang dan peran aktif dari partai politik, KPU, dan Menteri Dalam Negeri.

### **REFERENCES**

- Admintosholo. (n.d.). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu#>
- Agus Dedi. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). *Dynastic Politics in Regional Head Elections: the Intersection Between Human Rights and Democracy (Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan*

- Antara Hak Asasi Dan Demokrasi). *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 105–119.
- DetikEdu, K. (2021). 8 Macam Demokrasi dan Penjelasannya yang Perlu Diketahui Siswa. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5811772/8-macam-demokrasi-dan-penjelasannya-yang-perlu-diketahui-siswa>
- Hermansyah, F., & Adi, A. S. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 686–700.
- Hukumonline, T. (2024). Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/>
- Jiddan Gamal Qondas, & Sutopo. (2024). Politik Dinasti Ditengah Sistem Demokrasi. *The Republic : Journal of Constitutional Law*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.867>
- Kompas.com. (2022). Bentuk-Bentuk Demokrasi. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/04300071/bentuk-bentuk-demokrasi>
- Kurniawan, W. (2024). Dinasti politik hari ini: upaya yang bisa dilakukan untuk memutus rantainya. <https://theconversation.com/dinasti-politik-hari-ini-upaya-yang-bisa-dilakukan-untuk-memutus-rantainya-219819>
- Makka, S. A. (2023). Apa Itu Politik? Berikut Pengertian, Tujuan dan Contoh Perilakunya. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa aspek, seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, dan cara masyarakat menegakkan peraturan dalam masyara
- Meidiana, D. (2024). Pakar Politik Sebut Demokrasi di Indonesia Alami Pelemahan.
- Nika, I. (2021). Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020). *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 562–577. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art9>
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 416. <https://doi.org/10.31078/jk16210>
- Rangkuti, M. (2023). Apa Itu Demokrasi?
- Rusmana, A. R., Abigail, A., & Tantiono, I. C. (2024). Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Semarang, S. 13. (2023). Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). <https://sma13smg.sch.id/materi/masa-demokrasi-terpimpin-1959-1965/>
- Sutanto, H. (2020). Apa yang salah dengan Dinasti Politik. <https://www.law-justice.co/artikel/81719/apa-yang-salah-dengan-dinasti-politik--/>
- Yusuf, M. A. (n.d.). Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip. [https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/#google_vignette)